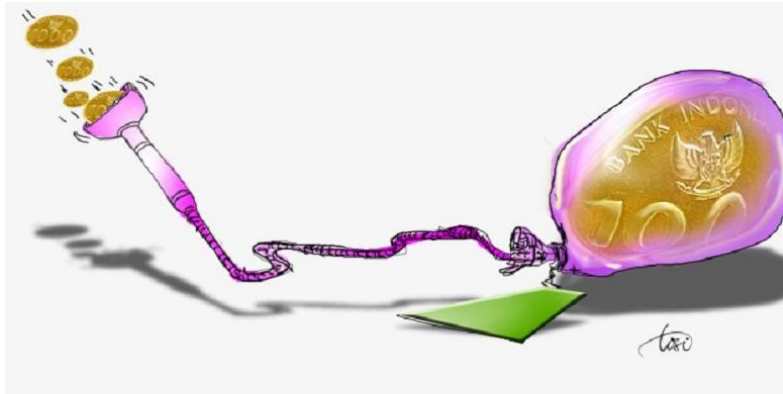


DKI Jakarta dan Anggaran Siluman

AIMAN WITJAKSONO

Kompas.com - 27/11/2017, 06:58 WIB



Ilustrasi anggaran.(TOTO SIHONO)

MASIH ingat dengan wawancara di TV dengan Gubernur [Basuki Tjahaja Purnama \(Ahok\)](#), yang sangat viral hingga dua tahun setelahnya, bahkan lebih?

Kala itu, hasil wawancara menjadi viral, karena ada kegeraman luar biasa, yang akhirnya tersebutlah "bahasa toilet" dalam wawancara siaran langsung yang saya pandu.

Anggaran siluman

Setelah satu pekan dibahas di berbagai media, saya pun mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), karena dianggap tidak segera menghentikan program dengan siaran langsung (*live*) tersebut. Meskipun kala itu, saya sudah mengingatkan beberapa kali Pak Ahok.

Dan akhirnya, saya memutuskan menceritakan detail kejadian yang melatarbelakangi situasi itu. Baru kali ini, saya hendak blak-blakan tentang apa yang terjadi pada Maret 2015 silam. Simak, ya...

Baca juga : [Sandi: Rezimnya Pak Ahok-Djarot yang Masukin Anggaran, Saya Sisir Lagi](#)

Kala itu, awal bulan Maret 2015, saya mendapat kepastian untuk mewawancarai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), setelah sebelumnya Pemimpin Redaksi KompasTV, Ibu Rosianna Silalahi, memberi kabar ke saya, soal kesediaan Pak Ahok untuk diwawancara.

Apa yang diwawancara? Anggaran DKI Jakarta!

Ya, saya sangat ingin mengupas apa yang terjadi dengan [anggaran](#) yang baru saja diserahkan DPRD DKI Jakarta ke Gubernur.

Kejadiannya persis sama saat ini, di mana masyarakat termasuk media, melihat ada kejanggalan dalam anggaran tersebut.

Gubernur Ahok pun waktu itu beberapa kali sudah memberikan sinyal-sinyal kegeramannya dalam wawancara *doorstop* alias wawancara harian media di Balai Kota Jakarta.

Saya pun tertantang untuk menanyakan blak-blakan soal anggaran yang janggal. Tercapailah wawancara saya EKSKLUSIF dan pertama kali dengan Gubernur Ahok, pada 17 Maret 2015 di Balai Kota Jakarta, membahas anggaran Ibu Kota.

Mungkin tidak ada yang tahu, Pak Ahok kala itu mengajak saya makan malam di ruang kantor Gubernur, sebelum wawancara berlangsung.

Baca juga : [Sandiaga: Anggaran Membengkak Banget Itu karena PMD BUMD](#)

Ngobrol sebelum wawancara



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan stafnya Sunny Tanuwidjaja menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016). Dalam kasus ini, Ariesman Widjaja didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar secara bertahap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.

(KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

Di sana kami bersama beberapa staf Gubernur Ahok, juga dengan sosok yang belakangan baru saya tahu namanya, Sunny Tanuwidjaja.

Kami di meja makan itu membicarakan anggaran di DPRD DKI Jakarta yang begitu karut-marut. Pak Ahok sambil makan malam, bercerita kepada saya, betapa ia kalut dan kecewa dengan hasil pembahasan anggaran kala itu.

Ia juga sempat menyebut andil sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan petinggi di Provinsi DKI Jakarta yang terlibat dalam pembahasan anggaran DKI Jakarta, yang menurutnya ada Rp 12 triliun dana yang entah berantah alias siluman.

Di akhir makan malam kami, Pak Ahok mengatakan kepada saya, "Saya akan buka-bukaan soal anggaran ini, kamu beruntung bisa wawancara!"

Mulailah sesi wawancara, *Live!*

Segmen pertama berlangsung lancar, sebagai prolog dialog berbicara soal kejadian paling akhir di Balai Kota, termasuk soal anggaran DKI Jakarta yang banyak jadi konsumsi media beberapa hari terakhir.

Beranjak ke segmen kedua, saya bertanya ke Pak Ahok lebih detail, soal jumlah, cara alias modus, dan bagaimana bisa ada uang siluman triliunan rupiah dalam anggaran.

Termasuk pertanyaan "serangan" yang disampaikan oleh sejumlah pihak DPRD DKI Jakarta kala itu, terkait dengan foto istri Ahok, Ibu Veronica Tan, yang duduk di kursi rapat Gubernur.

Pada pertanyaan soal inilah, ia tampak marah besar bukan kepada saya, tetapi pada pihak DPRD, barulah saya ingatkan, kepadanya soal ini.

Wawancara berujung sanksi

Mengapa saya tidak menghentikan serta merta kala itu? Saya menganggap ada hak publik untuk tahu soal kongkalikong anggaran Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. Dan saat itu, Gubernur Ahok berjanji akan mengupas semua kebobrokan pembahasan yang diketahuinya.

Baca juga : [Melihat Penyusunan Anggaran Era Ahok dan Anies...](#)

Sekali lagi, saya sebagai jurnalis tertantang untuk membuka hal ini semua. Walaupun akhirnya ada sanksi yang dikenakan terkait wawancara saya di stasiun KompasTV, tempat saya bekerja.

Meski demikian, saya cukup puas, karena dari wawancara inilah, pertama kali dibahas dalam soal dana siluman Rp 12 triliun, yang akhirnya jadi diskusi berminggu-minggu di masyarakat dan juga media.



Suasana sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus UPS Alex Usman di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kamis (3/3/2016). (Jessi Carina)

Belakangan, diketahui sebagiannya dibelanjakan untuk alat yang bernama *uninterruptible power supply* (UPS). Kemudian dipasang khusus di banyak sekolah di DKI Jakarta.

Pada akhirnya, kasus hukum korupsi UPS ini akhirnya menjerat Pejabat Pemprov DKI, Anggota DPRD, hingga vendor alias penyedia unit pada proyek ini. Kasusnya ditangani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Sebagian darinya sudah divonis penjara.

Bagaimana kini?

Anggaran DKI Jakarta kini

Saya belum berani mengatakan anggaran siluman. Karena memang belum bisa dibuktikan secara hukum.

Meski saya kembali mewawancarai khusus Wakil Gubernur DKI Jakarta [Sandiaga Uno](#), hari Sabtu dua hari lalu (25/11/2017). Saya menanyakan kepadanya perihal ini.

Pak Wagub setuju dengan pertanyaan saya, bahwa ada angka yang mencurigakan dalam anggaran yang baru dibahas oleh DPRD dan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ia menyebutkan satu hal, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari hasil penyisiran PMD ini saja, satu hal, bisa menghemat anggaran hingga lebih dari Rp 2 triliun.

Baca juga : [Dari Tim Gubernur sampai Kolam Air Mancur, Anggaran DKI Tahun 2018 yang Menyita Perhatian...](#)

Wagub menginformasikan ini baru dalam wawancara saya kepadanya, alias belum pernah diungkapkan sebelumnya.



Ilustrasi APBD DKI Jakarta, diambil dari

<http://apbd.jakarta.go.id/pub/2018/1/6>(apbd.jakarta.go.id/pub/2018/1/6)

Sandiaga Uno mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahkan di luar Jakarta sekalipun, untuk terus menyuarkan kejanggalan dalam anggaran, yang kini bisa bebas dilihat melalui situs: apbd.jakarta.go.id.

Pfuuuh... memang setiap zaman selalu ada pemburu keuntungan, dengan jalan yang tak dibenarkan, angkanya bahkan mencapai triliunan! Padahal sudah dengan cara *e-budgeting* di zaman *now!*

Eh, tapi ada yang berbeda, *deh*. Dahulu media sosial tidak seperti sekarang. Kalau sekarang, sadisnya *enggak* ketulungan, meski sumber datanya tidak semua bisa diandalkan, serta tak jarang salah sasaran. Bukan nurani, tapi jangan-jangan sekadar emosi berbalut benci.

So..., cari data detail yang valid, dan tetap suarkan kebenaran, karena mengawal anggaran adalah hak kita, untuk masa depan peradaban!

Mari!

Saya Aiman Witjaksono,
Salam.

Dari Tim Gubernur sampai Kolam Air Mancur,

Anggaran DKI Tahun 2018 yang Menyita Perhatian...

JESSI CARINA

Kompas.com - 24/11/2017, 06:49 WIB



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan teks pidato penyampaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11/2017). (KOMPAS.com/NURSITA SARI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI 2018 mendapatkan begitu banyak sorotan dari masyarakat. Satu per satu mata anggaran dikuliti untuk melihat keefektifannya.

Apalagi, ini merupakan RAPBD pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Adapun, R-APBD DKI tahun 2018 Rp 77,1 triliun.

Berikut ini merupakan beberapa anggaran yang sempat menyita perhatian publik :

TGUPP

Salah satu anggaran yang menyedot perhatian adalah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Rencana anggarannya meningkat dari Rp 2,3 miliar menjadi Rp 28 miliar. Tidak hanya itu, rencananya jumlah anggota tim juga akan diperbanyak hingga 74 orang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memindahkan stafnya ke dalam TGUPP tersebut. Dia ingin semua yang bekerja dengan gubernur mendapat SK pengangkatan dan digaji APBD.

"Jadi Alhamdulillah kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

Baca juga : [Anies: Semua yang Bantu Akan Masuk TGUPP, Diangkat, dan Berseragam](#)



Gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersama tim sinkronisasi di Jalan Tirtayasa II Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2017). (KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)

Namun, ada kekhawatiran bahwa ini menjadi celah memberikan posisi bagi para tim sukses yang dulu mendukung Anies-Sandi. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono.

Baca juga : [Sumarsono: Saya Khawatir TGUPP untuk Menampung Mantan Tim Sukses Anies](#)

"Jumlah ditambah jadi 74 pasti anggarannya meledak sekian kali lipat, tapi itu konsekuensinya. Berapa sih jumlah kebutuhan tim gubernur yang real, yang diinginkan Pak Anies. Saya khawatir ini (TGUPP) hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan untuk sebuah tim atau expertis yang dibutuhkan gubernur," ujar Sumarsono.

Kolam air mancur

Anggaran lain yang menyedot perhatian adalah anggaran kolam air mancur [DPRD DKI](#). Anggaran ini diusulkan oleh Sekretariat Dewan Rp 620 juta. Anggaran ini menjadi pembicaraan karena dananya dinilai terlalu besar hanya untuk merehabilitasi kolam.

Baca juga : [Anggaran Rp 620 Juta untuk Beli Ikan Koi dan Renovasi Kolam DPRD DKI](#)

Apalagi, anggaran kolam tersebut pernah dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri tahun lalu. Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi mengatakan kolam itu akan diperbaiki, keramiknya diganti, dan kolamnya diperdalam. Biaya Rp 620 juta diambil dari rencana biaya yang dibuat bersama Dinas Pertamanan.

"Itu (kolam) mau dibenerin dan diberi ikan koi, sama mau kami perdalam juga," ujar Yuliadi.



Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta.

Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017). (KOMPAS.com/JESSI CARINA)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengisyaratkan dukungannya terhadap rancangan anggaran itu. Menurut dia, kolam air mancur itu juga menjadi tanda menambah kesejukan antara eksekutif (Pemprov DKI Jakarta) dan legislatif (DPRD DKI Jakarta).

Baca juga : [Sandiaga: Air Mancur Menambah Kesejukan Eksekutif-Legislatif](#)

"Kami hargai sebagai bentuk, mungkin (kolam air mancur) bisa menambah kesejukan di teman-teman di DPRD dan meningkatkan persatuan, ini baru nyambung, kan, antara eksekutif dan legislatif. Alhamdulillah, jadi sebuah yang sejuk. Jadi, air mancur itu menambah kesejukan di kami," ujar Sandiaga.

Dana hibah

Rencana pemberian dana hibah pada tahun 2018 Rp 1,7 triliun. Dana hibah itu diberikan untuk badan, lembaga, organisasi swasta, maupun organisasi masyarakat. Dana hibah diberikan Pemprov DKI tiap tahunnya kepada berbagai lembaga.

Pada era Anies-Sandi, dana hibah tetap diberikan kepada beberapa lembaga yang pada tahun 2016 juga menerima. Sebut saja seperti Bamus Betawi dan Laskar Merah Putih. Lembaga-lembaga yang banyak menerima dana hibah pada tahun 2018 adalah majelis taklim, masjid, dan musala.

Baca juga : [Laskar Merah Putih Sebut Dana Hibah Rp 500 Juta untuk Bela Negara](#)



Ketua Laskar Merah Putih DKI Jakarta Agus Salim di Balai Kota, Senin (24/10/2016). (Alsadad Rudi)

Namun, lembaga-lembaga keagamaan lain juga masuk dalam penerima dana hibah. Anies Baswedan mengaku ingin memfasilitasi kegiatan keagamaan di Jakarta.

Baca juga : [Anies: Indonesia Berdasar Pancasila, Kami ingin Semua Kegiatan Terfasilitasi...](#)

"Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Kami ingin semua kegiatan juga bisa terfasilitasi, baik kegiatan-kegiatan sosial, budaya, pendidikan, termasuk keagamaan," ujar Anies

Kunjungan kerja Dewan

Anggaran lain yang dinilai cukup besar adalah anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta. Pada tahun 2018, anggaran yang dikucurkan Rp 107,7 miliar.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, anggota Dewan bisa melakukan kunjungan kerja ke luar kota setiap pekan. Hal itu menjadi salah satu alasan kenaikan anggaran kunker pada R-APBD DKI 2018.

Baca juga : [Anggota DPRD DKI: Ada Pergub yang Atur Kami Bisa ke Luar Kota Tiap Pekan](#)

"Sekarang ada pergub (peraturan gubernur) yang baru, yang mengatur kami bisa ke luar kota setiap minggu, itu di situ ada pergubnya," ujar Prabowo.



Anggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta pada RAPBD 2018 naik karena menyesuaikan surat keputusan gubernur.

Baca juga : [Sekretaris DPRD DKI: Kenaikan Anggaran Kunker Menyesuaikan SK Gubernur](#)

SK tersebut yakni Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri yang ditandatangani mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Dalam SK tersebut, koefisien pengali untuk setiap harga satuan berubah, seperti biaya hotel, representasi, taksi, hingga tiket pesawat.

Pengadaan lahan

Ada juga anggaran pengadaan lahan Rp 798,1 miliar. Sandiaga awalnya mengatakan anggaran itu digunakan pengadaan lahan beberapa program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya untuk program pengendalian banjir.

"Untuk pembebasan lahan itu berkaitan dengan program-program pengendalian banjir, program-program pengadaan ruang terbuka, dan ini yang kami dorong," ujar Sandiaga.

Baca juga : [Anggaran Gelondongan Pengadaan Lahan Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018](#)



Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan, saat ditemui di kantornya, Selasa (5/9/2017). (Kompas.com/Sherly Puspita)

Namun, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Dharmawan mengatakan anggaran tersebut salah satunya untuk pengadaan lahan bagi program rumah DP 0.

"Pokoknya anggaran itu baik untuk rusunawa maupun DP 0," ujar Agustino.

Agustino mengatakan pembebasan lahan dilakukan di semua wilayah Jakarta. Namun, dia belum memiliki rincian lokasi lahan yang akan dibeli.